Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Volume 2 Nomor 3; November 2023
E-ISSN: 2962-066X

MANAJEMEN PROGRAM KARTU TANI OLEH DINAS PERTANIAN DI KABUPATEN AGAM

Mauli Yarni

Universitas Andalas Padang
1610842013@student.unand.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana manajemen program kartu tani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi non partisipan. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh William H Newman yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kartu tani di Kabupaten Agam telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun dalam pelaksanaanya masih belum optimal. Hal ini terjadi karena masih terdapat masalah yang dihadapi diantaranya kurangnya sosialisasi sehingga masih ada petani yang tidak paham manfaat kartu tani, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjuang jalannya program, selain itu masih lemahnya pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan program kartu tani selanjutnya dibutuhkan peningkatan sumberdaya baik itu dari segi manusianya maupun non manusia.
Kata Kunci: **Kartu, Tani, Pupuk, Bersubsidi**

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze how the farmer card program is managed by the Agam District Agriculture Service. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach, data collection techniques using interviews, documentation and non-participant observation. The selection of informants was carried out using purposive sampling. This research uses the management theory put forward by William H Newman which consists of the processes of planning, organizing, gathering resources, work control and supervision. The research results show that the farmer card program in Agam Regency has been implemented quite well, although its implementation is still not optimal. This happens because there are still problems being faced, including a lack of socialization so that there are still farmers who do not understand the benefits of farmer cards, as well as limited facilities and infrastructure to support the running of the program, apart from that there is still weak supervision carried out. Implementation of the farmer card program further requires increasing resources both in terms of human and non-human.
Keywords: ***Card, Farming, Fertilizer, Subsidized***

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan, peningkatan dan pembanguan ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian penting bagi ketersediaan pangan masyarakat dan sebagai penyedia bahan baku atas sektor usaha lainnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan

kuantias hasil pertanian pemerintah berupaya menyedikan sarana produksi pertanian salah satu diantranya adalah pengadaan pupuk. Dimana pupuk menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan pertanian. Pupuk sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan hasil produksi, mengingkat bahwasanya pupuk merupkan sumber zat hara yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman, memperbaiki struktur dan kesuburan tanah serta mempercepat pertumbuhan tanaman.

Sebenarnya kebijakan mengenai pupuk bersubsidi ini sudah sering dilakukan namun faktanya masih banyak permasalahan yang terjadi sepanjang subsidi pupuk diberlakukan, seperti kelangkaan pupuk, harga yang tidak sesuai dengan yang di tetapkan serta pupuk yang diberikan tidak tepat sasaran. Melihat hal itu pemerintah indonesia melalui kementrian pertanian membuat suatu kebijkan mengenai pupuk bersubsidi yaitu program kartu tani dimana masyarakat harus menggunakan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk mengefesienkan pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga hanya petani kecil yang menjadi sasaran subsidi atau bantuan ini. Program ini dimulai pada tahun 2017 di Pulau Jawa dan di perluas hingga seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti masih belum mencukupinya sarana dan prasarana penunjang jalannya program, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program karrtu tani ini. Serta adanya penambahan biaya angkut ke rumah masing-masing petani karena akses yang cukup jauh dari rumah, dan masih adanya petani yang belum memiliki kartu tani dan masalah krusial lainnya.

Dengan adanya kendala yang muncul dalam pelaksanaan program kartu tani tentunya perlunya manajemen yang baik oleh dinas pertanian kabupaten agam karena dinas pertanianlah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program sehingga tujuan dari pogram kartu tani dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah lembaga Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, antara lain wawancara dengan beberapa informan yang dipilih secara puposive sampling, dokumentasi serta observasi. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendaptakan pemahaman lebih mendalam tentang manajemen atau pelaksanaan dinas dalam menjalan progam kartu tani ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegitan, petunjuk teknis, kebijkan yang digunakan serta dokumen terkait lainnya. Sementara itu observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan dan praktek yang dilakukan oleh Dinas Pertanian tersebut. Teknik analisis data

dilakukan dengan cara menguraikan data, meyusun data, serta memisahkan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi penyajian data kedalam bentuk tabel atau diagram ataupun unit-unit yang mudah dipahami serta dijabarkakan dalam bentuk deskriptif naratif, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengorganisasian

Tujuan

Menetapkan tujuan merupakan tahapan awal dalam sebuah perencanaan, dimana Willam H Newman mengatakan bahwa sebuah tujuan harus dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dipahami serta tujuan yang ditetapkan haruslah masuk akal, ideal, serta dapat dicapai, tanpa adanya tujuan yang jelas penggunaan sumberdaya organisasi menjadi tidak efekif. Tujuan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan program dimana nantinya program yang dijalankan tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan gambaran masa yang akan datang atau hasil dari apa yang direncanakan. Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa program kartu tani ini merupakan gerakan dari pusat yang kemdian juga diwajibkan bagi daerah untuk melaksanakannya dimana dinas pertanian Kabupaten Agam telah merumuskan secara jelas mengenai tujuan dari program ini dan di tuangkan ke dalam rencana strategis dinas. Serta program kartu tani telah direncanakan melalui rapat sebelum program ini diselenggarakan di Kabupaten Agam. Rapat ini dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Agam, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, serta dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan bidang terkait lainnya. Dengan adanya penentuan tujuan yang jelas sehingga nantinya diharapkan sumberdaya dapat digunakan secara efektif dan efesien.

Selain itu tujuan yang ingin capai dari pelaksanaan program kartu tani ini sejalan dengan visi dan misi dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam, yaitu terwujudnya *Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani* dengan adanya kartu tani dapat membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk sesuai kebutuhannya dan dengan harga terjangkau agar dapat meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian hingga akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat petani.

Meskipun tujuan telah dirmuskan dan ditetapkan dengan baik namun belum mampu mewujudkan kedaulatan mensejahterakan rakyat petani peneliti menemukan bahawa petani yang ditargetkan menerima kartu tani di Kabupaten Agam belum seluruhnya mendapatkan kartu tani. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam jumlah petani yang menerima kartu tani itu sebanyak 34. 886 orang namun hingga akhir tahun 2022 yang terdistribusi baru 25.927 kartu tani artinya masih banyak petani yang belum merasakan

manfaat kartu tani. Hal ini karena ada petani yang belum singkron jadi belum bisa di cetak kartunya, ada juga yang belum memenuhi persyaratan, serat ada yang masih dalam masa pengurusan. Artinya penting untuk dinas Pertanian untuk lebih memaksimalkan upayanya dalam pencapaian tujuan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat berjalan secara optimal.

Kebijakan

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 15/M-DAG/PER/14/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi itu dimulai dari tingkat produsen hingga kepada petani. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi dalam bab VI pasal 15 dikatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan kartu tani. Selanjutnya adanya Keputusan Gubenur Sumatera Barat Nomor 521.4.62-2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk bersubsidi tingkat Kabuapten. Menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengeluarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada Kecamatan

Dalam penyelenggraan program sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan dimana dalam peraturan tersebut sudah dijabarkan cara pelaksanaanya sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktivitas pelaksanaan program, dalam proses penyelenggaraan subsidi pupuk terdapat petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi yang dijadikan acuan bagi petugas pelaksana kegiatan agar terdapat kesepahaman dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Petunjuk teknis ini diatur dalam Keputusan Direktur jendral Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi yang mana yang menjadi sasaran dari petunjuk teknis ini adalah Dinas Pertanian, stakeholder terkait, tim teknis, dan serta petani penerima pupuk bersubsidi. Petunjuk teknis ini mengatur tentang penyusunan RDKK, penyaluran pupuk bersubsidi, verifikasi dan validasi data, pembayaran subsidi, monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kartu tani telah berdasarkan aturan dan kebijakan yang jelas yang di jadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Program

Saat ini kita memasuki era *distruption* yaitu era dimana perkembangan teknologi informasi berkembang semakin cepat, dimana pola kerja yang semula dilakukan secara konvensional berubah menjadi teknologi informasi. Salah satu yang menerapkan teknologi informasi ini adalah pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Penerapan e-government merupakan salah satu

cara pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan begitu juga dalam bidang pertanian salah satunya kartu tani melalui aplikasi e-RDKK. Perbedaan sistem distribusi pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dengan sistem sebelumnya yaitu distribusi pupuk dilakukan secara langsung kepada petani serta kelebihan kartu tani dibandingkan dengan sistem disribusi pupuk bersubsidi sebelumnya adalah kartu tani terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Sistem kartu tani yang terintegrasi dengan SIMPI ini memiliki keunggulan antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan dan multifungsi. Kartu ini berbentuk kartu debit yang secara khusus diterbitkan untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk di mesin EDC dimana untuk mendapatnya kita harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Menentukan Metode, Prosedur, dan Waktu Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan suatu program tentunya dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Dimana prosedur diartikan sebagai urutan tindakkan atau kegiatan yang terorganisir dalam rangka pencapain tujuan, karena adanya prosedur yang jelas mengenai detail kegiatan maka kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menetapkan waktu pelaksanaan juga merupakan hal yang penting dalam sebuah perencanaan. Adapun prosedur dalam pelaksanaan program kartu tani telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan yang terdiri dari proses sosialisasi/pedataan, verivikasi data hingga penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani yang mana kegiatan ini telah ditatur semuanya oleh pusat. Dalam proses sosialisasi dan pendataan ditemui bahwa sosialisasi yang dilakukan belum optimal dimana masih ditemui masyarakat yang tidak memiliki kartu tani karena mereka tidak tahu syarat dalam mendapatkan kartu tani.

Pada saat proses pengimputan data juga ditemui bahwa penyuluh pertanian mengalami sedikit kesulitan karena terkadang data yang di akan di input tidak singkron dengan data disdukcapil sehingga data yang di input tidak valid dengan sistem hal ini dapat memperlambat proses percetakan kartu karena harus dilakukan pendataan ulang. Tentunya hal tersebut akan memakan waktu cukup lama.

Pengorganisasian

Pengelompokkan Pekerjaan

Pengelompokkan kegiatan merupakan setiap aktivitas yang dilakukan untuk membagi dan mengelompokkan kegiatan yang dilakukan, sehingga kemudian menghasilkan suatu kelompok kerja yang tersusun secara teratur melalui sebuah struktur organisasi. Agar pengorganisasian berjalan dengan baik maka hendaknya ada pengelompokkan kerja yang baik. Penyelenggaraan program kartu tani diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah yang ada di

Indonesia. Kabupaten Agam dipimpin oleh seorang Bupati sebagai pemeritahan tertinggi di Kabupaten Agam. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bupati menyerahkan urusan bidang petanian dalam hal ini program kartu tani ke Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Dinas Pertanian Kabupaten Agam bertanggung jawab melaksanakan program kartu tani di Kabupaten Agam. Dinas Pertanian terdiri dari struktur yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam mencapai tujuannya Dinas pertanian Kabupaen Agam telah mengelompokkan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dengan membentuk bidang-bidang. Pelaksana dari program kartu tani telah menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian sebagaimana tugas pokok dan fungsinya serta bidang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan yang membawahi Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Penyuluhan Pertanian dan Pembiayaan

Penugasan dan pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang dan penugasan dilakukan Dinas Pertanian dengan membentuk bidang-bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pelimpahan wewenang ini tidak hanya sebatas memberikan tugas dan tanggung jawab kebawahan saja tetapi juga memberikan kebebasan dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk mengambil inisiaif untuk peningkatan pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan Program kartu tani kepala dinas melakukan pelimpahan wewenang kepada bidang prasarana dan sarana pertanian berdasarkan tupoksi yang dimiliki. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan penempatannya pada struktur, dimana kepala bidang akan memberikan pertanggungjawaban ke kelapa dinas, kasi akan memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah diembannya ke kepala bidang, dan petugas lapangan akan melaporkan kegiatannya ke Koordinator BPP.

Koordinasi dan wewenang

Dalam penyelenggaraan program kartu tani tentu harus ada koordinasi yang baik antar pelasana dan pihak terkait lainnya agar program terselenggara dengan baik sesuai dengan rencana. Dalam program kartu tani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam bertanggung jawab sebagai koordinator untuk wilayah Kabupaten Agam, dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian sebagai penanggung jawab program kartu tani di tingkat kabupaten sesuai daerah kewenangannya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya kepala dinas memiliki kewenangan untuk membina, merumuskan kebijakan melaksanakan serta melakukan pemantauan. Namun suatu kegiatan tidak akan berhasil jika hanya dikerjakan oleh satu orang tanpa adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain. Dinas pertanian tiap bagiannya melakukan koordinasi dengan menjalin komunikasi yang baik, dengan adanya komunikasi yang efektif akan memperkuat pemahaman masing-masing anggota mengenai program kartu tani. . Selain itu dalam proses pembuatan kartu

tani dan mesin EDC Dinas Petanian Kabupaten Agam berkoordinasi dan bekerjasama dalam sebuah nota kesepakatan atau MoU dengan Bank Mandiri. adanya koordinasi yang dilakukan dengan bank mandiri dimana disepakati bahwa Bank Mandiri bertanggung jawab dalam percetakan kartu tani dan penyediaan mesin EDC untuk wilayah Kabupaten Agam.

Pengumpulan sumber

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan dan proses manajemen. Dengan adanya sumber daya manusia kegiatan manajemen dapat berjalan dan dapat mencapai tujuannya karena pada dasarnya sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan tanpa adanya manusia sebuah organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan yang inginkan. Menurut William H Newman, ketersediaan sumberdaya manusia sangat penting dalam kegiatan manajemen, tanpa adanya sumber daya manusia kegiatan manajemen tidak akan berjalan sesuai dengan yang dinginkan.

Dalam pelaksanaannya Dinas Pertanian tidak mengalami kendala dalam jumlah anggota anggota yang dimiliki memadai dan mencukupi akan tetapi untuk tim yang turun kelapangan itu belum mencukupi dengan jumlah yang ada**.** dari segi kuantitas penyuluh lapangan itu mengalami kekurangan sesuai dengan data dari Lakip dinas pertanian Kabupaten Agam dimana penyuluh pertanian termasuk bidang peternakan itu hanya sebanyak 80 orang saja dan jumlah tersebut berkurang setiap tahunnya, dikarenakan ada yang pindah tugas, ataupun pensiun seharusnya jumlah ideal penyuluh yang dimiliki sebanyak 188 orang.

Berdasarkan data yang di dapat pegawai dinas pertanian dan mereka yang bekerja sebagai koordinator penyuluh pertanian adalah lulusan sarjana, artinya sumber daya yang dimiliki mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan seperti yang kita tahu dimana tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemahamannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

Sumber Dana

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka dalam hal ini sumber anggaran dalam program kartu tani berasal sepenuhnya berasal dari APBN dan apabila diperlukan maka dapat didukung oleh dana APBD setempat untuk biaya yang tidak ditanggung oleh APBN. Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota dan jumlah kabupaten/kota dalam provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersbsidi.

Temuan dilapangan didapatkan bahwa dalam segi anggaran itu tidak ada dana khusus untuk kartu tani, selama proses penerapan kartu tani tidak ada biaya atau anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Penyuluh Lapangan sebagai pihak yang terlibat langsung dengan petani tentunya tidak

adanya anggaran ini mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pencapaian tujuan program kartu tani. Disini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan program kartu tani pendanaannya masih belum memadai

Sarana dan Prasarana

Penyaluran pupuk bersubsdi tidak akan berjalan lebih efektif dan efisien apabila faktor penunjangnya tidak tersedia. Dalam program kartu tani ini sarana yang utama dibutuhkan tentu adanya kartu tani, mesin EDC dan untuk admin sebagai pihak yang melakukan pendataan sarana yang dibutuhkan yaitu Form RDKK, untuk pengadaan sarana dan prasarana itu sendiri pihak Dinas Pertanian Kebuapaten Agam sudah mengikat perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri dimana pihak bank yang menyediakan kartu tani dan juga mesin EDC sebagian alat transaksi dalam penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer. Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penunjang jalannya program kartu tani yaitu berupa kartu tani dan mesin EDC namun belum semua masyarakat mendapatkan kartu tani serta mesin EDC yang disedikan belum memadai jadi dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana dalam program kartu tani ini belum memadai sehingga tentu saja hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan program kartu tani.

Ketersediaan Alat

Dalam menjalankan program kartu tani tertu memerlukan berbagai peralatan yang memadai untuk mendukung terlaksananya tujuan program. Dalam penyelenggaraan program kartu tani itu dalam proses validasi dan verifkasi data menggunakan aplikasi SIMLUTAN. Aplikasi ini adalah apikasi sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian yang merupakan basis data petani berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), yang mana aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi rencana defenitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) dan SIMPI. dalam penyelenggaraan Program Kartu Tani memerlukan peralatan seperti komputer, printer dan yang paling utama yaitu ketersediaan jaringan internet, baik itu pada tahap input data hingga penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani itu dilakukan secara online jadi jika jaringan Internet lemah akan mengganggu penyelenggaraan program

Methode

Metode atau cara merupakan tata cara yang digunakan dalam mencapai hasil yang maksimal dalam usaha dan tujuan yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan program kartu tani di Kabupaten Agam menggunakan metode daring (dalam jaringan). Metode daring dalam proses penginputan data secara online dengan berbasis teknologi informasi yaitu menggunakan aplikasi SIMLUHTAN. Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh kementrian pertanian yang menyajikan data dan informasi kelembagaan penyuluhan pertanian baik tingkat provinsi,

kabupaten maupun kecamatan. Aplikasi ini memuat data yang lengkap dan valid antara data dilapangan dengan data pencatatan sipil. Melalui aplikasi ini seluruh kegiatan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan mulai dari tahapan persiapan hingga monitoring yang mana semuanya dilakukan secara online dan berjenjang. Oleh karenanya agar penyelenggaraan program pupuk bersubsdi ini berjalan lancar, maka pelaksanaannya mengacu kepada petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi.

Pasar

Pasar yang dimaksud yaitu adanya sasaran dan target dari program, jika pasar tidak tersedia maka kegiatan manajemen dipastikan tidak akan berhasil. Pasar yang dimaksud dalam program kartu tani adalah mayarakat petani. Peran serta masyarakat sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Dalam hal ini target pasar dari program kartu tani adalah seluruh petani di Indonesia yang dibagi menjadi dua yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani dan petani yang tidak tergabung dengan kelompok tani dalam hal ini yaitu seluruh petani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam.

Pengendalian kerja

Pengendalian kerja dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi. Proses pelatihan yang diberikan merupakan teknik bagaimana pengoperasian aplikasi atau sistem penginputan data tujuannya untuk mempersiapkan anggota agar mereka dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan tujuan. Training dan pelatihan yang diberikan kepada BPP yang tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam agar anggota pelaksana memiliki keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai tugas yang diberikan. Proses pelatihan rutin dilakukan yaitu sekali dalam sebulan dengan materi yang disampaikan menyesuaikan dengan kebutuhan. Dari wawancara disimpulkan bahwa dalam prosedur kerja baru selalu ada pelatihan yang diberikan kebawahan agar mereka paham akan tugas yang akan mereka laksanakan dilapangan nantinya. Dilaksanakannya bimbingan kerja berupa sosialisasi dan pelatihan sehingga anggota pelaksana dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal namun kepada masyarakat sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas pada tahap pembagian kartu saja. Sehingga ada sebagian masyarakat yang kurang paham bagaimana memanfaatkan kartu tani dengan baik.

Pengedalian kerja yang baik tentu harus adanya hubungan kerja yang baik, hubungan kerja yang baik dapat tercipta melalui suatu komunikasi yang baik antara sumberdaya yang ada sehingga mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu bentuk komunikasi untuk mendapatkan kesepahaman antar anggota yaitu dengan mengadakan rapat atau musyawarah. Selain itu juga ada pelaporan kegiatan dari masing-masing pelaksana yang nantinya berguna untuk menyamakan informasi sehingga tidak terjadi misskomunikasi antara pelaksana.

Laporam ini berupa laporan rutin perbulan dan laporan setiap kegitan yang diadakan.

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi agar suatu program dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Tentunya pengawasan sangat berperan penting bagi keberhasilan sebuah organisasi, dimana pengawasan dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang hendak dicapai. Pengawasan dilakukan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengawasan yang baru berjalan yaitu pengawasan tidak langsung, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan baik itu dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan, berupa uraian kata-kata, deretan kata-kata ataupun diagram. Untuk pengawasan langsung itu belum berjalan secara makasimal karena untuk langsung turun ke lapanagan dinas pertanian masih terkendala biaya sehingga Dinas masih memanfaatkan sistem pelaporan dari bawahan dan jika ditemui penyimpangan barulah Dinas bersama pihak terkait turun untuk menindaklanjuti.

SIMPULAN

Program pendistribusian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani merupakan sebuah program yang dibentuk oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang lahirnya program kartu tani berasal dari berbagai permasalahan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Program ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Agam pada akhir 2019 hingga sekarang, secara kesuluruhan manajemen program kartu tani di Kabupaten Agam telah berjalan cukup baik namun dikarenakan program ini masih dalam masa transisi jadi dalam penyelenggaraannya masih belum maksimal dan perlu evaluasi dan perbaikan. Misalnya masih perlu digencarakannya sosialisasi, meningkatkan kualitas sarana dan prasana serta memperketat proses pengawasan program.

DAFTAR PUSTAKA

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung.

Chakim, M. L. (2020). *Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jurnal Pangan*. https://doi.org/10.33964/jp.v28i3.444

Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2020). Persepsi Petani Dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*,*28*(2),131–144. https://doi.org/10.14203/jep.28.2.2020.131-144

Khairad, F. 2020. Analisis Wilayah *Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pada Subsektor tanaman pangan dan tanaman holtikultura di Kabupaten Agama*, *jurnal AGRIFO*,vol 5 (1)

Latifa, M, *Analisis Efekifitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjar Negara*, jurnal administrasi publik

Moko, Koko Widyat. 2017. Suwarto dan Bekti Wahyu Utami. *perbedaan persepsi petani terhadap program kartu tani di kecamatan kalijambe kabupaten sragen*.. 32(1). Journal of Sustainable Agriculture

Nadziroh, M. N. (2020). *Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di KabupatenMagetan*. *Jurnal Agristan*. https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2348

Widarti, Kurniawan, & Simpuk, S. (2016). Analisis Pemasaran Pupuk Bersubsidi Tanaman Pangan. *Jurnal Agrosains*, *13*(2), 9–13.

Dokumen

Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam 2022

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/kpts/RC.210/B/11/2022

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor.11/Kpts/SR.310/B/03/2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Agam, 2020

Peraturan menteri perdagangan nomor15/MDag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Enceran Pupuk Bersubsidi

Peraturan Presiden RI No 15 tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana perubahan atas Peraturan Presiden no 77 tahun 2005